

## Koalisi partai politik terhadap munculnya calon Tunggal pada Pilkada 2024

Septica Sisilia, \*Suryanef, Al Rafni, Irwan Hamdi  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: \*Suryanef  
E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

### Abstract

*The emergence of a single candidate in the 2024 Regional Head Election in Dharmasraya Regency creates a dilemma between political parties' interests in securing electoral victory and the democratic principle of fair political competition. This study aims to analyze the factors influencing the nomination of a single candidate from both internal and external perspectives of political parties, as well as its implications for public trust. This research employs a qualitative approach with a descriptive case study method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review involving political party representatives, election organizers, and the community. The findings indicate that the emergence of a single candidate is influenced by centralized decision-making at the national party level, pragmatic political strategies, weak party cadre development, high political costs, candidate electability, and nomination threshold regulations. These conditions have led to decreased public enthusiasm and trust, although some citizens continue to participate as a form of democratic responsibility. These findings suggest that the quality of democracy has not been fully optimized, particularly in terms of political competition and representation.*

### Article History

Received: 26 April 2026

Accepted: 13 June 2026

Published: 15 June 2026

### Keywords:

Single candidate,  
regional election,  
Pilkada

## PENDAHULUAN

Fenomena munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi salah satu dinamika politik yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks kualitas demokrasi lokal. Secara normatif, demokrasi menekankan adanya kompetisi politik yang terbuka, partisipasi masyarakat, serta kebebasan dalam menentukan pilihan. Namun, dalam praktiknya, munculnya calon tunggal justru menunjukkan keterbatasan dalam aspek kompetisi politik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip demokrasi telah berjalan secara optimal. Menurut Affan Gaffar (2006), demokrasi yang berkualitas ditandai oleh adanya kompetisi politik yang terbuka, partisipasi masyarakat, serta kebebasan dalam menentukan pilihan.

Dalam perspektif kelembagaan politik, partai politik memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta representasi kepentingan masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008:405). Melalui fungsi tersebut, partai politik diharapkan mampu menghadirkan kader-kader yang berkualitas serta menyediakan alternatif kandidat dalam kontestasi politik. Namun dalam praktiknya, partai politik sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam hal kaderisasi maupun dalam pengambilan keputusan politik yang cenderung terpusat pada elite partai. Kondisi ini menyebabkan partai politik lebih memilih strategi pragmatis dengan mendukung kandidat yang dianggap memiliki peluang kemenangan tinggi dibandingkan mengusung kader internal.

Fenomena calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari faktor internal dan eksternal partai politik. Secara internal, dominasi elite partai dalam pengambilan keputusan serta lemahnya demokrasi internal menjadi faktor yang membatasi munculnya kandidat alternatif (Katz & Mair, 1995:12). Sementara itu, secara eksternal, tingginya biaya politik dalam proses pencalonan dan kampanye serta ketentuan ambang batas pencalonan menjadi hambatan struktural bagi partai politik untuk mengusung calon secara mandiri (Downs, 1957:28). Ketentuan ambang batas yang mensyaratkan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah turut mendorong terbentuknya koalisi besar yang pada akhirnya mengarah pada konsolidasi dukungan pada satu kandidat.

Selain itu, dalam perspektif demokrasi, keberadaan calon tunggal menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek kompetisi politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Affan Gaffar (2006:73), demokrasi yang berkualitas ditandai oleh adanya kompetisi yang terbuka, partisipasi masyarakat, serta kebebasan dalam menentukan pilihan. Ketika kompetisi politik tidak berjalan secara optimal, maka proses demokrasi menjadi kurang substantif dan berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai institusi demokrasi. Di sisi lain, fenomena calon tunggal juga menimbulkan implikasi sosial-politik di tingkat masyarakat, seperti menurunnya antusiasme dan partisipasi politik, serta munculnya sikap apatis. Namun demikian, dalam beberapa kasus, masyarakat tetap menunjukkan kesadaran politik melalui partisipasi dalam pemilihan maupun dukungan terhadap kotak kosong sebagai

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena calon tunggal, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai demokrasi lokal, perilaku partai politik, serta hubungan antara dinamika politik dan kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pengusungan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian difokuskan

pada satu kasus spesifik dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Prosedur penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pengurus partai politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat sebagai pemilih. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, data pemilu, serta sumber literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika koalisi partai politik serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika partai politik dalam membentuk koalisi pengusungan calon tunggal pada Pilkada 2024 di Dharmasraya

Terbentuknya koalisi partai dalam pelaksanaan Pilkada menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai dalam menghadirkan pilihan kandidat dalam kompetisi politik, dan memperluas representasi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Secara normatif terbentuknya koalisi partai dipengaruhi oleh faktor kesamaan visi, misi, serta ideologi partai. Dalam dinamika terbentuknya koalisi besar calon tunggal pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya mekanisme pengambilan keputusan, kaderisasi partai, dan konsolidasi politik antar partai.

#### a. Mekanisme pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan partai politik dalam pengusungan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 berlangsung melalui beberapa tahapan yang melibatkan komunikasi internal partai, penjangkaran kandidat, koordinasi antar partai, hingga pemberian rekomendasi oleh pimpinan partai. Pada tahap awal, masing-masing partai politik melakukan pengamatan terhadap peta politik menjelang Pilkada 2024. Pengurus partai di tingkat daerah mulai melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang berpotensi maju sebagai calon kepala daerah. Dalam proses ini, partai menilai berbagai aspek seperti popularitas, elektabilitas, kapasitas kepemimpinan, jaringan politik, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap calon yang akan diusung.

Ramlan Surbakti (2010), menyatakan bahwa proses seleksi kandidat oleh partai politik tidak hanya didasarkan pada aspek ideologis, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan kandidat untuk memperoleh dukungan publik dan memenangkan kompetisi politik. Oleh karena itu, elektabilitas dan tingkat penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan partai terkait pencalonan kepala daerah. Lebih lanjut penilaian yang demikian itu menjadi dasar awal bagi partai untuk menentukan kandidat yang dianggap memiliki peluang terbesar untuk memenangkan Pilkada.

Setelah melakukan pemetaan politik, partai-partai mulai membangun komunikasi politik dengan partai lain. Komunikasi ini bertujuan untuk melihat kemungkinan terbentuknya koalisi dalam menghadapi Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas partai politik memiliki pandangan yang relatif sama terhadap kandidat yang dianggap paling kuat secara politik. Kesamaan pandangan tersebut kemudian mendorong terbentuknya kesepakatan antar partai untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang sama. Tahapan yang demikian itu menggambarkan proses negosiasi politik menjadi sangat penting

karena setiap partai berupaya memastikan bahwa kepentingan politiknya tetap terakomodasi dalam koalisi yang akan dibentuk. Hal ini sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo (2015), yang mengatakan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu proses menyeleksi individu-individu yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi untuk menduduki jabatan politik. Dalam proses tersebut, partai politik mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan kepemimpinan, dukungan masyarakat, serta peluang keberhasilan kandidat dalam suatu kontestasi politik.

Tahap selanjutnya adalah proses pengajuan nama calon kepada struktur partai yang lebih tinggi. Meskipun pengurus partai di tingkat daerah DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang memiliki peran dalam memberikan usulan dan rekomendasi, keputusan akhir tetap berada pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai. Pengurus daerah hanya menyampaikan hasil komunikasi politik, kondisi lapangan, serta pertimbangan elektoral yang menjadi dasar pengusulan kandidat. Selanjutnya, DPP melakukan evaluasi terhadap usulan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti peluang kemenangan, stabilitas partai, serta arah kebijakan politik partai secara nasional. Setelah rekomendasi dari DPP diterbitkan, partai-partai yang sebelumnya melakukan komunikasi politik mulai menyatakan dukungan secara resmi kepada pasangan calon yang sama. Proses ini menyebabkan semakin banyak partai yang bergabung ke dalam koalisi besar. Seiring bertambahnya jumlah partai pendukung, peluang munculnya kandidat alternatif menjadi semakin kecil karena sebagian besar kekuatan politik telah terkonsentrasi pada satu pasangan calon.

Andi Luhur Prianto (2025), mengatakan bahwa proses seleksi kandidat kepala daerah di Indonesia masih cenderung tertutup dan didominasi oleh pertimbangan pragmatis serta kalkulasi kemenangan politik. Dalam praktiknya, proses seleksi kandidat sering kali berlangsung melalui komunikasi elite dan pertimbangan elektoral yang lebih menekankan peluang kemenangan dibandingkan kompetisi internal partai. Kondisi yang demikian itu pada akhirnya menghasilkan situasi dimana hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan partai politik untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada.

Keputusan partai politik yang dihasilkan bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan yang cukup panjang dengan mempertimbangkan kondisi politik daerah, peluang kemenangan kandidat, serta kepentingan strategis partai politik. Proses tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh elite partai dalam menentukan arah dukungan politik.

Meskipun terdapat proses komunikasi dan konsultasi di tingkat daerah, keputusan final tetap berada di tangan elite partai pada tingkat pusat. Budi, A (2020) mengatakan bahwa proses seleksi kandidat dalam partai politik Indonesia masih didominasi oleh elite partai tingkat pusat sehingga kewenangan pengurus daerah dalam menentukan calon relatif terbatas. Akibatnya, pertimbangan elektoral dan kepentingan strategis partai sering kali lebih dominan dibandingkan mekanisme kompetisi internal partai dalam menentukan kandidat yang akan diusung.

Lebih lanjut kondisi yang demikian itu menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam partai politik masih cenderung bersifat sentralistik. Akibatnya, proses pencalonan kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan elite politik daripada kompetisi terbuka yang melibatkan kader partai secara luas. Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

#### b. Kaderisasi partai

Kaderisasi merupakan salah satu fungsi utama partai politik dalam sistem demokrasi. Melalui proses kaderisasi, partai politik seharusnya mampu mempersiapkan anggota-

anggotanya menjadi calon pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan politik yang memadai untuk berkompetisi dalam berbagai kontestasi politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kaderisasi tidak hanya bertujuan menciptakan regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan keberlanjutan organisasi dan kualitas demokrasi. Menurut Scarrow (2015), partai politik yang kuat ditandai oleh kemampuannya dalam melakukan rekrutmen dan pengembangan kader secara berkelanjutan guna menghasilkan pemimpin yang mampu mewakili kepentingan masyarakat serta menjaga keberlangsungan organisasi partai. Oleh karena itu, kaderisasi menjadi instrumen penting dalam membangun kompetisi politik yang sehat dan demokratis. mampu mempersiapkan anggota-anggotanya menjadi calon pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan politik yang memadai untuk berkompetisi dalam berbagai kontestasi politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah.

Proses kaderisasi dimulai dari perekrutan anggota partai yang kemudian diberikan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam struktur partai. Melalui tahapan tersebut, partai politik dapat mengidentifikasi kader-kader potensial yang memiliki kemampuan untuk dipersiapkan menjadi calon kepala daerah. Namun, dalam praktiknya banyak partai politik lebih fokus pada pencapaian target elektoral jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang melalui pembinaan kader. Akibatnya, ketika memasuki momentum Pilkada, partai tidak memiliki cukup kader yang dinilai mampu bersaing secara politik dan memperoleh dukungan masyarakat yang luas.

Berdasarkan temuan penelitian, salah satu alasan terbentuknya calon tunggal adalah terbatasnya figur internal partai yang dianggap memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang memadai untuk menghadapi kontestasi Pilkada. Akibatnya, ruang kompetisi politik menjadi semakin sempit dan berujung pada terbentuknya pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan partai politik lebih memilih mendukung tokoh yang telah memiliki basis dukungan kuat di masyarakat dibandingkan mengusung kader sendiri. Pilihan tersebut dianggap lebih aman dan memiliki peluang kemenangan yang lebih besar dibandingkan mengambil risiko dengan mengajukan kader internal yang belum memiliki kekuatan politik yang cukup. Dengan kata lain, lemahnya hasil kaderisasi mendorong partai politik untuk mengutamakan figur yang sudah populer daripada membangun kompetisi politik melalui kader yang mereka miliki.

Proses kaderisasi yang kurang optimal juga dipengaruhi oleh pola pengambilan keputusan yang masih terpusat pada elite partai. Dalam banyak kasus, kesempatan untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak selalu ditentukan oleh prestasi kader dalam organisasi, tetapi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan elektabilitas, kekuatan jaringan politik, serta kemampuan kandidat dalam memperoleh dukungan yang luas. Akibatnya, kader partai yang telah lama berproses dalam organisasi sering kali tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kontestasi politik. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi kader untuk aktif dalam kegiatan partai karena peluang untuk berkembang menjadi pemimpin politik dianggap terbatas.

Selain itu, lemahnya kaderisasi juga menunjukkan bahwa partai politik belum sepenuhnya menjalankan fungsi rekrutmen politik sebagaimana yang diharapkan dalam sistem demokrasi. Terbatasnya kader yang dianggap layak untuk diusung menyebabkan partai-partai politik cenderung berkumpul pada satu figur yang dinilai paling kompetitif. Lili, Romli (2018) mengatakan bahwa kaderisasi partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menghasilkan kader yang siap bersaing dalam kontestasi politik elektoral. Kondisi tersebut menyebabkan partai politik lebih mengutamakan figur

yang memiliki modal politik dan elektabilitas tinggi dibandingkan kader yang tumbuh melalui proses kaderisasi internal. Akibatnya, fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik dan regenerasi kepemimpinan belum berjalan secara optimal.

Fenomena calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya memperlihatkan bahwa keberhasilan partai politik tidak hanya diukur dari kemampuannya memenangkan pemilu, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kader yang siap berkompetisi dalam kontestasi politik. Ketika hampir seluruh partai politik memilih memberikan dukungan kepada kandidat yang sama. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa partai belum memiliki stok kader yang cukup kuat untuk menjadi alternatif kepemimpinan daerah. Akibatnya, ruang kompetisi politik menjadi semakin sempit dan masyarakat kehilangan pilihan politik yang beragam.

Dengan demikian, mekanisme kaderisasi yang belum berjalan secara maksimal menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem kaderisasi partai politik melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, pembinaan kader secara sistematis, serta pemberian kesempatan yang lebih luas kepada kader untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan politik. Melalui kaderisasi yang kuat, partai politik tidak hanya mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga dapat memperkuat demokrasi lokal dengan menghadirkan kompetisi politik yang lebih sehat dan demokratis.

c. *Konsolidasi politik antar partai*

Proses konsolidasi dimulai ketika partai-partai politik mulai membaca peta kekuatan politik yang berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Berbagai informasi mengenai tingkat popularitas calon, dukungan masyarakat, pengalaman politik, hingga kemampuan kandidat dalam membangun jaringan politik menjadi bahan pertimbangan utama. Dari hasil pengamatan tersebut, muncul pandangan yang relatif sama di kalangan partai politik bahwa terdapat satu figur yang memiliki posisi politik lebih kuat dibandingkan kandidat lainnya. Kesamaan persepsi inilah yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya komunikasi politik antar partai. Dalam proses tersebut, komunikasi yang dilakukan tidak selalu berlangsung secara formal melalui forum resmi partai. Sebaliknya, banyak komunikasi yang dilakukan melalui pertemuan informal antara elite partai, tokoh politik daerah, maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. Melalui komunikasi tersebut, partai-partai mulai bertukar pandangan mengenai peluang kemenangan masing-masing kandidat dan kemungkinan membangun kerja sama politik yang lebih luas. Pada tahap ini, kepentingan untuk memenangkan Pilkada mulai menjadi fokus utama dibandingkan persaingan antar partai.

Seiring semakin intensifnya komunikasi yang dilakukan, partai-partai mulai menyadari bahwa mengusung kandidat yang berbeda berpotensi memecah kekuatan politik yang ada. Di sisi lain, mendukung kandidat yang sama dianggap dapat memperbesar peluang kemenangan sekaligus memberikan keuntungan politik bagi seluruh partai yang terlibat dalam koalisi. Pertimbangan tersebut mendorong partai-partai untuk mulai meninggalkan perbedaan politik yang selama ini ada dan lebih mengedepankan kepentingan bersama dalam memenangkan kontestasi Pilkada. Konsolidasi politik kemudian semakin menguat ketika partai-partai mulai menyatakan dukungan secara bertahap kepada kandidat yang sama. Setiap dukungan yang diberikan oleh satu partai menciptakan efek domino bagi partai lainnya. Partai yang sebelumnya masih mempertimbangkan berbagai alternatif akhirnya ikut bergabung karena melihat bahwa mayoritas kekuatan politik telah mengarah kepada satu pasangan calon. Situasi ini menyebabkan ruang bagi munculnya kandidat alternatif menjadi semakin sempit karena sebagian besar dukungan politik telah terkonsentrasi dalam satu koalisi besar.

Tabel 1. Data dukungan partai politik terhadap calon tunggal

| Nama Partai    | Jumlah Kursi DPRD | Status Dukungan Terhadap Calon Tunggal |
|----------------|-------------------|--|
| PDI Perjuangan | 6                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| Golkar         | 5                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| PAN            | 5                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| Gerindra       | 4                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| PKB            | 4                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| Demokrat       | 2                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| Hanura         | 1                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| PPP            | 1                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |
| PKS            | 1                 | Mendukung Pasangan Calon Tunggal       |

*Sumber: Olahan Peneliti dan KPUD Dharmasraya*

Dalam perkembangannya, konsolidasi politik yang terjadi tidak hanya bertujuan untuk memenangkan Pilkada, tetapi juga untuk menjaga stabilitas hubungan antarpolisi setelah pelaksanaan Pilkada. Melalui koalisi yang besar, partai-partai berharap dapat membangun hubungan politik yang lebih solid serta memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung dalam koalisi tidak hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek berupa kemenangan elektoral, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan politik jangka panjang.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya lebih mengarah pada proses konsolidasi kekuatan politik daripada kompetisi politik. Partai-partai yang seharusnya bersaing dalam menawarkan alternatif kepemimpinan kepada masyarakat justru memilih untuk menyatukan dukungan pada satu pasangan calon. Akibatnya, proses politik yang semula diperkirakan akan berlangsung kompetitif berubah menjadi konsensus politik yang menghasilkan calon tunggal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam praktik politik lokal, kepentingan untuk menjaga kekuatan dan peluang kemenangan sering kali lebih dominan dibandingkan upaya menciptakan kompetisi politik yang sehat dalam sistem demokrasi.

### **Implikasi munculnya calon tunggal terhadap kualitas demokrasi lokal**

Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur pemilihan, tetapi juga dari adanya kompetisi politik yang sehat, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan dalam proses politik, (Affan Gaffar;2006). Dalam konteks Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, keberadaan calon tunggal menunjukkan bahwa demokrasi secara prosedural tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun secara substantif mengalami penurunan kualitas. Keterbatasan alternatif kandidat menyebabkan masyarakat memiliki pilihan politik yang sempit, sehingga fungsi demokrasi sebagai sarana kompetisi dan representasi politik tidak berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Dharmasraya yang dibuktikan dengan tingginya angka golput dan munculnya kritikan masyarakat yang ditandai dengan gerakan kotak kosong.

a. Tingginya angka golput

Berdasarkan data KPU Kabupaten Dharmasraya (2024), Hasil Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan calon tunggal Annisa Suci Ramadhani–Leli Arni memperoleh 65.922 suara atau 39,03% dari total pemilih terdaftar. Sedangkan kotak kosong memperoleh 28.895 suara atau 17,11%. Di sisi lain, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) mencapai 74.096 orang atau sebesar 43,87% dari total daftar pemilih tetap (DPT) yakni sebanyak 168.913. Tingginya angka golput tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dalam perspektif demokrasi lokal karena jumlahnya bahkan lebih besar dibandingkan suara yang diperoleh pasangan calon tunggal maupun kotak kosong.

Gambar 2. Distribusi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan peneliti dan data KPUD

Berdasarkan diagram di atas, golput menjadi kategori dengan persentase tertinggi yaitu 43,87%, disusul oleh pasangan calon tunggal Annisa Suci Ramadhani–Leli Arni sebesar 39,03%, sedangkan kotak kosong memperoleh 17,11%. Tingginya angka golput menunjukkan bahwa hampir setengah dari total pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Kondisi ini dapat menjadi indikasi menurunnya partisipasi politik masyarakat sekaligus mencerminkan tantangan demokrasi lokal dalam menghadirkan kompetisi politik yang mampu menarik keterlibatan publik. Fenomena calon tunggal yang membatasi pilihan politik masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya tingkat golput tersebut. Akibatnya, meskipun Pilkada tetap berlangsung secara prosedural sesuai ketentuan yang berlaku, kualitas demokrasi secara substantif perlu menjadi perhatian karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi lokal.

Besarnya angka golput dapat dipahami sebagai salah satu indikator melemahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang menentukan legitimasi suatu pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat, maka semakin kuat pula legitimasi yang dimiliki oleh pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, tingginya angka golput menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik yang sedang berlangsung. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya ketidakpuasan, ketidakpedulian, maupun rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pilihan politik yang tersedia.

Fenomena calon tunggal turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Ketika masyarakat hanya dihadapkan pada satu pasangan calon dan kotak kosong sebagai alternatif pilihan, ruang kompetisi politik menjadi sangat terbatas. Tidak adanya persaingan antar kandidat menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk membandingkan gagasan, program, serta visi pembangunan yang ditawarkan oleh berbagai calon. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bahwa Pilkada tidak lagi menghadirkan pilihan politik yang benar-benar representatif terhadap aspirasi mereka sehingga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Lebih lanjut, fenomena calon tunggal menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi karena kompetisi politik tidak berlangsung secara optimal. Demokrasi yang ideal menuntut adanya persaingan yang sehat antar kandidat untuk memperoleh dukungan masyarakat. Ketika hanya terdapat satu pasangan calon, fungsi kompetisi politik menjadi berkurang sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap berbagai alternatif kepemimpinan yang ditawarkan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung, (Wuragil dan Widayati; 2021).

Selain itu, tingginya angka golput juga dapat diartikan sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Dalam demokrasi yang sehat, partai politik memiliki fungsi untuk melakukan kaderisasi dan menghadirkan berbagai alternatif kepemimpinan kepada masyarakat. Namun, munculnya calon tunggal menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Ketika hampir seluruh partai politik memberikan dukungan kepada satu pasangan calon, masyarakat dapat memandang bahwa proses demokrasi telah kehilangan unsur kompetitifnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hasil pemilihan telah dapat diprediksi sejak awal sehingga minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi menurun.

Tingginya angka golput berimplikasi pada kualitas demokrasi lokal secara substantif. Meskipun secara prosedural Pilkada tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari tingkat keterlibatan masyarakat dan tersedianya pilihan politik yang beragam. Ketika jumlah masyarakat yang tidak memilih mencapai 43,87%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal menghadapi tantangan dalam membangun partisipasi politik yang luas dan inklusif.

Dengan demikian, tingginya angka golput dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dapat dipandang sebagai salah satu indikator menurunnya kualitas demokrasi lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal tidak hanya berdampak pada terbatasnya kompetisi politik, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari partai politik untuk memperkuat kaderisasi, memperluas ruang kompetisi politik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi agar kualitas demokrasi lokal dapat berkembang secara lebih substantif dan partisipatif.

b. Munculnya gerakan kotak kosong

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menimbulkan berbagai respons dari masyarakat. Salah satu implikasi yang muncul adalah berkembangnya sikap apatis politik. Sikap apatis tersebut juga terlihat dari tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data KPU Kabupaten Dharmasraya (2024), Hasil Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menunjukkan bahwa pasangan calon tunggal Annisa Suci Ramadhani–Leli Arni memperoleh 65.922 suara atau 39,03% dari total pemilih terdaftar, sedangkan kotak kosong memperoleh 28.895 suara

atau 17,11%. Di sisi lain, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) mencapai 74.096 orang atau sebesar 43,87% dari total daftar pemilih tetap (DPT) yakni sebanyak 168.913. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah golput jauh lebih besar dibandingkan jumlah suara yang diperoleh baik oleh pasangan calon tunggal maupun kotak kosong. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan minat sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik lokal.

Affan Gaffar (2006) menyatakan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh adanya kompetisi politik yang sehat, partisipasi masyarakat, dan kebebasan dalam menentukan pilihan politik. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Dharmasraya, kompetisi politik tidak berlangsung secara optimal karena sebagian besar partai politik membentuk koalisi besar dan mengusung satu pasangan calon. Akibatnya, masyarakat memiliki pilihan politik yang terbatas sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Dengan kata lain, demokrasi secara prosedural tetap berjalan karena Pilkada tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun secara substantif kualitas demokrasi mengalami penurunan karena berkurangnya ruang kompetisi politik.

Meskipun demikian, tidak seluruh masyarakat merespons kondisi tersebut dengan sikap apatis. Sebagian masyarakat justru menunjukkan bentuk partisipasi politik melalui dukungan terhadap gerakan kotak kosong. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari unggahan media sosial @infodharmasraya, muncul berbagai ajakan dan kampanye dukungan terhadap kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap dominasi koalisi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya. Dukungan terhadap kotak kosong menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik yang dinilai tidak memberikan alternatif pilihan kandidat yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal dapat mengurangi kualitas kompetisi politik dan memunculkan berbagai bentuk respons masyarakat, mulai dari sikap apatis hingga munculnya gerakan politik alternatif sebagai bentuk kritik terhadap partai politik. Dalam kasus Kabupaten Dharmasraya, kedua fenomena tersebut terlihat secara bersamaan, yaitu tingginya angka golput sebagai indikator apatisisme politik dan munculnya gerakan kotak kosong sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap koalisi besar partai politik yang mengusung calon tunggal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika terbentuknya koalisi besar dalam mengusung calon tunggal pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal partai politik. Faktor internal meliputi mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik, kuatnya pengaruh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terhadap keputusan partai di daerah, lemahnya kaderisasi partai politik, dominasi elite politik, serta strategi pragmatis yang berorientasi pada peluang kemenangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingginya elektabilitas kandidat, besarnya biaya politik dalam kontestasi Pilkada, dan ketentuan ambang batas pencalonan (*threshold*) yang mendorong partai-partai politik untuk membentuk koalisi besar. Kondisi tersebut menyebabkan hampir seluruh partai politik di Kabupaten Dharmasraya memberikan dukungan kepada satu pasangan calon sehingga menghasilkan fenomena calon tunggal dalam Pilkada Tahun 2024.

Munculnya calon tunggal memberikan implikasi terhadap kualitas demokrasi di Kabupaten Dharmasraya. Fenomena ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya sikap apatis politik, serta berkembangannya gerakan kotak kosong. Selain itu fenomena ini mengurangi kompetisi pada kontestasi politik lokal. Dengan demikian, fenomena calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa

keberhasilan partai politik tidak hanya diukur dari kemampuannya memenangkan kontestasi politik, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan fungsi kaderisasi, rekrutmen politik, dan menghadirkan kompetisi politik yang sehat dalam sistem demokrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. New York, NY: Harper & Row.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme politik: Antara koalisi, pencalonan dan calon tunggal dalam pilkada. *Jurnal Transformatif*, 5(1).
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishak, N. (2020). Problematika pemilihan kepala daerah calon tunggal dalam partai politik Indonesia. *Pena Justisia*, 19(1).
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. (2024). *Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024*. Dharmasraya: KPU Kabupaten Dharmasraya.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah*.
- Michels, R. (1991). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York, NY: Free Press.
- Mufti, M., & Durrotun, N. D. (2013). *Teori-teori politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurrahmah, S. (2019). Gagasan mencegah timbulnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah serentak dalam perspektif partai politik di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6(1).
- Rahman, R. A. (2022). Single candidate in local election: Leadership crises and threats to democracy. *Jurnal Konstitusi*, 19(1).
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang*
- Riker, W. H. (1962). *The theory of political coalitions*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Romli, L. (2018). Pilkada langsung, calon tunggal, dan masa depan partai politik lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2).
- Tjenreng, Z. (2020). *Peran partai politik di Indonesia melalui pilkada serentak*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Wuragil, S., & Widayati. (2021). Development of democracy and phenomenon of single candidate in regional election (Pilkada). *Law Development Journal*, 3(1)